

IMPLEMENTASI DIGITALISASI PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH DALAM MENDUKUNG
TRANSPARANSI DAN AKUNTABILITAS PUBLIK PADA PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA

Febianti Az-Azahra¹, Putri Adellia², Agnes Lamtio³
Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis,
Universitas Bina Sarana Informatika

63231457@bsi.ac.id¹, 63231468@bsi.ac.id², lamtioagnes@gmail.com³

Abstract

The digitalization of regional financial management has become one of the government's efforts to improve transparency and public accountability through the use of information technology. The Provincial Government of DKI Jakarta has implemented various digital systems, such as e-Budgeting and the Regional Government Information System (SIPD), to support the processes of planning, budgeting, reporting, and supervising regional finances. This study aims to analyze the implementation of digitalization in regional financial management in supporting transparency and public accountability in the Provincial Government of DKI Jakarta. The method used is a descriptive qualitative approach with data collection techniques through observation and documentation study. The research results indicate that the implementation of e-Budgeting and SIPD is able to improve administrative efficiency, strengthen the transparency of financial information to the public, and support real-time budget supervision. Digitalization also contributes to strengthening accountability through electronic reporting systems and more effective internal controls. Nevertheless, its implementation still faces obstacles in the form of limited human resources, technical system disruptions, and data security challenges that require continuous attention.

Keywords: *Digitalization, Regional Financial Management, Transparency, Public Accountability, E-Budgeting.*

Abstrak

Digitalisasi pengelolaan keuangan daerah menjadi salah satu upaya pemerintah dalam meningkatkan transparansi dan akuntabilitas publik melalui pemanfaatan teknologi informasi. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah menerapkan berbagai sistem digital, seperti *e-Budgeting* dan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD), untuk mendukung proses perencanaan, penganggaran, pelaporan, dan pengawasan keuangan daerah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi digitalisasi pengelolaan keuangan daerah dalam mendukung transparansi dan akuntabilitas publik di Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Metode yang digunakan adalah pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui observasi dan studi dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan *e-Budgeting* dan SIPD mampu meningkatkan efisiensi administrasi, memperkuat keterbukaan informasi keuangan kepada masyarakat, serta mendukung pengawasan anggaran secara real time. Digitalisasi juga berkontribusi dalam memperkuat akuntabilitas melalui sistem pelaporan elektronik dan pengendalian internal yang lebih efektif. Meskipun demikian, implementasinya masih menghadapi kendala berupa keterbatasan sumber daya manusia, gangguan teknis sistem, dan tantangan keamanan data yang memerlukan perhatian berkelanjutan.

Article history

Received: Juli 2026

Reviewed: Juli 2026

Published: Juli 2026

Plagirism checker no 80

Copyright : author

Publish by : musytari



This work is licensed under
a [creative commons
attribution-noncommercial
4.0 international license](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/)

Kata Kunci: Digitalisasi, Pengelolaan Keuangan Daerah, Transparansi, Akuntabilitas Publik, <i>E-Budgeting</i> .	
---	--

1. Pendahuluan

Akibat lebih dari tiga dekade kekuasaan otoriter, transparansi pemerintah daerah pada era Orde Baru sangat terbatas. Kondisi ini ditandai oleh tingkat korupsi yang tinggi dan keterbatasan masyarakat terhadap informasi publik, terutama yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan negara. Setelah reformasi 1998, transparansi dan akuntabilitas muncul dan teknologi digital meresponnya. Pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, yang mengatur bahwa laporan pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) harus dibuat sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan yang telah ditetapkan dalam peraturan pemerintah.

Banyak bidang telah mengalami perubahan besar sebagai akibat dari kemajuan teknologi digital, termasuk bagaimana pengelolaan keuangan negara dan daerah. Menurut (Iswandari, 2021) digitalisasi keuangan merupakan bagian penting dari reformasi birokrasi yang bertujuan untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas tata kelola keuangan publik. Dengan menggunakan sistem berbasis digital, administrasi keuangan menjadi lebih cepat dan akurat. Ini dapat mengurangi kesalahan pencatatan dan mengurangi kemungkinan penyimpangan anggaran. Pemerintah daerah dapat menyediakan layanan yang lebih cepat dan sesuai kebutuhan masyarakat dengan menggunakan platform digital.

Mekanisme pemerintah sekarang berfokus pada pengelolaan informasi dan strategi komunikasi. Ini dikenal sebagai *e-government* atau *Electronic Government* yang merujuk pada penggunaan jaringan internet untuk menyebarkan informasi dan pelayanan pemerintah sehingga lebih mudah bagi masyarakat untuk mengaksesnya. Menurut Crespo et al. (2018) dalam jurnal (Wuryan Andayani et al., 2024), *e-government* adalah aplikasi teknologi informasi yang sangat penting untuk meningkatkan akses dan efektivitas persediaan layanan dan informasi pemerintah. Ada banyak tindakan yang membentuk tata kelola yang baik, seperti akuntabilitas, transparansi, efisiensi, supremasi hukum, partisipasi, daya tanggap, dan visi strategis.

Salah satu inovasi yang berkembang dalam pengelolaan keuangan daerah yaitu sistem *Electronic Budgeting (e-Budgeting)* yang merupakan bagian dari *e-government*. *E-Budgeting* merupakan sistem penyusunan anggaran berbasis web yang bertujuan untuk mempercepat penganggaran, mengurangi kesalahan input, dan menyediakan rekam jejak anggaran secara *realtime* adalah salah satu inovasi baru dalam pengelolaan keuangan daerah. Pengelolaan keuangan daerah, terutama Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), menjadi lebih sistematis dan mudah diawasi dengan *e-Budgeting*. Sehubungan dengan Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 86 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan APBN melalui *e-Budgeting*, pemerintah provinsi DKI Jakarta adalah salah satu daerah yang telah menerapkan sistem *e-Budgeting* sejak tahun 2018. Diyakini bahwa penerapan sistem *e-Budgeting* akan meningkatkan penghematan anggaran serta menciptakan sistem anggaran administrasi yang lebih tertib dalam pengelolaan anggaran. Menyusun, memverifikasi, dan mengawasi proses penganggaran secara elektronik adalah tugas utama dari sistem ini.

Menurut (Hasanah & Siregar, 2021) pemerintah menerapkan regulasi yang lebih ketat untuk melakukan reformasi dan meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan. Menurut (Mahlel, Ridwan, & Nasirwan, 2016) dalam jurnal (Akbar et al., 2024) pengelolaan daerah yang akuntabel merupakan salah satu komponen penting dari reformasi ini. Akuntabilitas berarti memberikan pertanggungjawaban, dan menjelaskan tindakan dan kinerja individu, badan hukum, atau pimpinan organisasi kepada pihak yang memiliki wewenang untuk meminta keterangan atau pertanggungjawaban.

Selain itu, terdapat gap penelitian yang menjadi urgensi padan penelitian ini. Studi sebelumnya menunjukkan bahwa e-budgeting di DKI Jakarta berjalan dengan baik, tetapi ada beberapa tantangan, seperti masalah dengan pengoperasian perangkat lunak, website yang tidak mudah diakses, dan keterbatasan sumber daya manusia. Oleh karena itu, penelitian ini penting untuk mempelajari secara menyeluruh bagaimana digitalisasi pengelolaan keuangan daerah diterapkan untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas publik di pemerintahan Provinsi DKI Jakarta.

2. Tinjauan Pustaka

Digitalisasi Pengelolaan Keuangan Daerah

Digitalisasi pengelolaan keuangan daerah merupakan proses transformasi pengelolaan keuangan pemerintah daerah dari sistem konvensional menuju sistem berbasis teknologi informasi guna meningkatkan efisiensi, efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas pengelolaan APBD. Implementasi digitalisasi dilakukan melalui penggunaan aplikasi seperti Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD), Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA), serta platform keuangan elektronik lainnya yang mendukung integrasi data secara *real time*. Digitalisasi memudahkan proses perencanaan, pelaporan, administrasi, dan pengawasan keuangan sehingga dapat mengurangi kesalahan administrasi maupun penyalahgunaan anggaran. Selain mendukung prinsip *good governance* melalui keterbukaan informasi publik, implementasinya masih terkendala oleh keterbatasan SDM, infrastruktur teknologi, dan keamanan data. (Dotulung, 2025) menyatakan bahwa penerapan sistem elektronik dalam pengelolaan keuangan daerah berkontribusi terhadap peningkatan transparansi dan akuntabilitas publik. Sementara itu, (Ilham Ferdiansyah et al., 2025) menjelaskan bahwa keberhasilan digitalisasi pengelolaan keuangan daerah dipengaruhi oleh kesiapan teknologi, kompetensi aparatur pemerintah, dan komitmen pemerintah daerah dalam menerapkan tata kelola pemerintahan berbasis digital.

Transparansi Publik

Transparansi publik merupakan prinsip keterbukaan pemerintah dalam menyediakan informasi kepada masyarakat terkait penyelenggaraan pemerintahan, khususnya dalam pengelolaan keuangan daerah. Transparansi menjadi salah satu unsur utama dalam mewujudkan pemerintahan yang demokratis karena memberikan akses kepada masyarakat untuk mengetahui proses perencanaan, pelaksanaan, hingga pertanggungjawaban penggunaan anggaran daerah. Penerapan transparansi publik dapat dilakukan melalui penyediaan laporan keuangan daerah secara terbuka, penggunaan *website* pemerintah daerah, serta penerapan sistem informasi berbasis digital yang memudahkan masyarakat mengakses informasi keuangan secara cepat dan akurat. Transparansi juga berperan penting dalam meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah serta meminimalkan potensi penyimpangan anggaran dan praktik korupsi. Menurut Manggaprouw et al. (2025) menunjukkan bahwa transparansi menentukan seberapa baik pengawasan publik terhadap penggunaan anggaran pemerintah dan seberapa baik pengelolaan keuangan daerah.

Akuntabilitas Publik

Akuntabilitas publik merupakan tanggung jawab pemerintah daerah dalam mempertanggungjawabkan seluruh kegiatan dan penggunaan anggaran kepada masyarakat sebagai bentuk pelaksanaan amanah pemerintahan. Dalam pengelolaan keuangan daerah, akuntabilitas diwujudkan melalui penyusunan laporan keuangan sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), pelaksanaan audit, serta penyampaian laporan secara transparan dan tepat waktu. Akuntabilitas juga menjadi tolok ukur keberhasilan tata kelola pemerintahan karena mencerminkan efektivitas dan efisiensi pengelolaan anggaran daerah. Di era digital, penerapan sistem informasi keuangan berbasis elektronik semakin memperkuat transparansi dan pengawasan. Penelitian (Manggaprouw et al., 2025) menunjukkan bahwa sistem

pengendalian internal dan transparansi meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Selain itu, (Aliyah Rifdatul Nabilah et al., 2026) menjelaskan bahwa digitalisasi dalam tata kelola keuangan daerah dapat meningkatkan akuntabilitas fiskal pemerintah daerah dengan membuat sistem pelaporan yang lebih terintegrasi dan dapat dipantau secara *real time*.

3. Metodologi Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis deskriptif-analitis. Ini dipilih karena fakta bahwa menerapkan digitalisasi pengelolaan keuangan daerah di Pemerintah Provinsi DKI Jakarta membutuhkan pemahaman yang mendalam tentang masalah tersebut. Metode ini tidak hanya menghasilkan deskripsi sederhana; itu juga mengeksplorasi makna proses dan dinamika yang mendorong perubahan menuju transparansi dan akuntabilitas publik. Dalam penelitian ini jenis data berdasarkan sumber yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Menurut (Sugiyono, 2023) data primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data. Sedangkan, data sekunder adalah sumber yang tidak langsung memberikan datanya (misal: dokumen perusahaan). Data primer berasal dari observasi non-partisipasi terhadap sistem dan portal resmi pengelolaan keuangan daerah yang tersedia bagi publik. Data sekunder terdiri dari dokumen kebijakan dan peraturan perundang-undangan, Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta tahun 2022, yang telah diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan, dokumen perencanaan seperti RPJMD dan RKPD, dan literatur ilmiah nasional dan internasional yang relevan. Observasi nonpartisipasi dan studi dokumentasi sistematis digunakan untuk mengumpulkan data. Model interaktif digunakan dalam analisis data, yang terdiri dari empat tahapan dinamis: pengumpulan data, kondensasi data, penyajian data, dan penarikan dan verifikasi kesimpulan. Tahapan-tahapan ini dikombinasikan dengan metode analisis isi kualitatif untuk menemukan tema dominan, pola hubungan antarvariabel, dan ketidaksesuaian antara ketentuan normatif dengan kenyataan implementasi. Empat kriteria memastikan keabsahan data. Dokumen kebijakan, laporan audit, publikasi ilmiah, dan data statistik resmi digunakan untuk menentukan kredibilitas. Dependabilitas dan transferabilitas ditunjukkan oleh deskripsi mendalam tentang konteks penelitian. Dependabilitas dipenuhi dengan dokumentasi proses penelitian yang rinci dan sistematis, dan konfirmabilitas dimungkinkan oleh audit trail yang melacak setiap kesimpulan ke sumber data awal. Tiga pilar teoretis membentuk dasar penelitian ini. Mereka adalah teori manajemen publik baru, yang menekankan efisiensi dan akuntabilitas sektor publik; teori e-government, yang menjelaskan bagaimana teknologi informasi mengubah hubungan pemerintah dengan warga negara; dan konsep pemerintahan yang baik, yang mencakup transparansi, akuntabilitas, partisipasi, efektifitas, dan supremasi hukum. Ketiganya dioperasionalisasikan melalui pengukuran seperti pendapat audit tentang laporan keuangan, tanggal penyampaian laporan, cakupan keterbukaan informasi anggaran, dan konsistensi antara anggaran yang direncanakan dan yang dilaksanakan. Secara keseluruhan, analisis ini terstruktur, empiris, dan dapat dipertanggungjawabkan secara akademis.

4. Hasil dan Pembahasan

4.1 Implementasi Sistem Informasi pengelolaan keuangan daerah (SIPD)

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah menggunakan berbagai jenis digitalisasi untuk mengatur keuangan daerah. Salah satu inovasi besar yang dilakukan adalah sistem *Electronic Budgeting (e-Budgeting)* yang mulai berlaku pada tahun 2018 dengan peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 86 Tahun 2016 tentang pedoman penyusunan APBD melalui e-budgeting (Rismanda, 2022). Sistem e-budgeting berbasis web ini bertujuan untuk mempercepat proses penganggaran, mengurangi kesalahan input, dan memberikan rekam jejak anggaran secara *real time*. SIPD meningkatkan efisiensi administrasi anggaran karena, data anggaran dapat

dipantau secara teratur. Selain itu, penerapan SIPD meminimalkan kemungkinan administrasi keuangan daerah melakukan apa yang tidak mereka inginkan.

4.2 Digitalisasi perencanaan dan penganggaran daerah

Dengan menggunakan sistem smart planning dan budgeting, pemerintah DKI Jakarta telah menerapkan digitalisasi dalam proses perencanaan dan penganggaran. Sistem ini mengintegrasikan tahapan perencanaan program dengan pengalokasian anggaran secara digital, sehingga proses penyusunan APBD menjadi lebih transparan dan efisien. Proses digitalisasi ini sejalan dengan gagasan tentang pemerintahan Cerdas, yang merupakan bagian dari transformasi kota Jakarta menjadi kota cerdas (Jaelani et al., 2026).

Digitalisasi penganggaran membantu penggunaan APBD karena seluruh proses dapat dilacak secara elektronik. Sistem ini juga memperkuat prinsip akuntabilitas public dan mengurangi kemungkinan penyimpangan anggaran lama apraktiknya, digitalisasi penganggaran meningkatkan pengawasan terhadap penggunaan dana public, mengurangi kesalahan manual, dan mempercepat proses verifikasi anggaran. Studi tentang pengelolaan keuangan daerah di DKI Jakarta menunjukkan bahwa kualitas kinerja pemerintah daerah sangat dipengaruhi oleh transparansi dan akuntabilitas (Mandasari et al., 2024).

4.3 Transparansi informasi keuangan Daerah kepada publik

Salah satu dampak paling nyata dari digitalisasi keuangan daerah di DKI Jakarta adalah peningkatan transparansi public. Pemerintah Provinsi telah menyediakan berbagai portal dan dashboard informasi APBD secara online yang dapat diakses public. Portal dan dashboard ini memungkinkan Masyarakat mengakses informasi mulai dari dokumen realisasi belanja, perencanaan anggaran, hingga laporan keuangan daerah mudah dibuka.

Keterbukaan informasi tersebut, membuat Masyarakat memiliki akses langsung ke informasi keuangan pemerintah, transparansi fiskal dapat membantu Masyarakat dalam berpartisipasi mengawasi penggunaan anggaran daerah. Analisis dokumen realisasi anggaran DKI Jakarta tahun 2021-2023, realisasi pendapatan dan efisiensi belanja telah meningkat.

4.4 Penguatan Akuntabilitas melalui sistem pelaporan elektronik

Penggunaan sistem pelaporan elektronik meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah DKI Jakarta. Semua proses pencairan anggaran, pelaporan belanja, dan pertanggungjawaban keuangan dilakukan secara digital, yang membuat audit dan evaluasi kinerja perangkat daerah menjadi lebih mudah. Kualitas laporan keuangan pemerintah daerah telah terbukti meningkat karena penerapan sistem akuntansi keuangan dan kompetensi sumber daya manusia (Novianty & Kurniawati, 2025).

Jejak data elektronik yang dibuat oleh sistem digital membantu pemerintah melakukan monitoring secara real time. Ini meningkatkan pengawasan internal dan memudahkan pemeriksaan oleh lembaga eksternal seperti BPK. Karena data lebih mudah diverifikasi dan dianalisis, digitalisasi administrasi publik dianggap dapat meningkatkan efektivitas tata kelola pemerintahan (Ciancarini et al., 2024).

4.5 Penguatan pengawasan internal dan pencegahan korupsi

Digitalisasi pengelolaan keuangan daerah sangat memperkuat sistem kontrol internal pemerintah daerah. Dengan menggunakan sistem digital mampu memproses monitor realisasi anggaran, identifikasi penyimpangan, dan evaluasi penggunaan dana daerah dilakukan secara real-time. Digitalisasi keuangan, terutama melalui elektronifikasi transaksi pemerintah daerah (ETPD), memperkuat tata kelola keuangan dan mempercepat pertumbuhan ekonomi daerah. Ini terjadi karena pemungutan pendapatan daerah menjadi lebih efisien dan efektif (Sinulingga, 2025). Kemampuan untuk mengidentifikasi anomali dengan cepat ini memungkinkan inspektorat, yang merupakan pengawas intern pemerintah, untuk melakukan perbaikan sebelum kerugian menjadi lebih besar.

Digitalisasi juga mengurangi interaksi manual dan ruang diskresi dalam proses administrasi. Selama ini, interaksi manual ini dikenal sebagai penghalang utama untuk praktik korupsi, manipulasi data, dan penyalahgunaan kewenangan. Setiap alur pencairan dana harus melalui verifikasi sistem yang ketat karena sistem yang lebih terbuka dan setiap transaksi tercatat secara otomatis. Karena tidak ada satu pun transaksi yang dapat lolos tanpa tercatat, hal ini menghalangi praktik kolusi.

4.6 Peningkatan kualitas tata Kelola pemerintahan

Digitalisasi pengelolaan keuangan daerah DKI Jakarta meningkatkan tata Kelola pemerintahan. Sistem digital mendorong pengelolaan keuangan yang lebih efisien, efektif, transparan dan akuntabel, keempat prinsip utama tersebut dikenal sebagai good governance. Selain itu, teknologi informasi mempercepat koordinasi antar perangkat daerah, yang menghasilkan lebih banyak integrasi dalam pelayanan administrasi.

Indeks Reformasi Birokrasi sering digunakan untuk mengevaluasi kualitas strategi, dengan peningkatan maturitas penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP). Namun, implementasi di lapangan tidak berjalan dengan lancar (Tewu et al., 2024). Keberhasilan kinerja pemerintah daerah juga dipengaruhi kualitas pelayanan publik, terutama di Tingkat daerah. Ini menunjukkan bahwa kinerja pemerintahan desa dapat berhasil dengan tercapainya tujuan penyelenggaraan desa, di mana peran utamanya adalah memberikan pelayanan kepada Masyarakat. Oleh karena itu, setiap aparatur pemerintahan daerah harus memiliki kemampuan professional dalam melaksanakan pelayanan public, terutama pelayanan administrasi (Mozin & Isa, 2023).

4.7 Kendala dalam implementasi digitalisasi keuangan daerah

Meskipun digitalisasi menawarkan banyak keuntungan besar, ada sejumlah kendala yang perlu diperhatikan saat diterapkan di dunia nyata. Keterbatasan sumber daya manusia yang kompeten dalam teknologi informasi adalah kendala paling umum. Studi tentang pelaksanaan SIPD di berbagai wilayah menunjukkan bahwa masalah seperti kekurangan tenaga kerja yang bertanggung jawab untuk mengelola SIPD, server yang sering down saat anggaran berubah, dan sistem yang tidak fleksibel masih menjadi masalah umum (Arfitsani & Prathama, 2025).

Selain masalah sumber daya manusia, kendala teknis lainnya meliputi kemungkinan gangguan keamanan siber yang mengancam keamanan data keuangan daerah, dan keharusan pembaruan sistem secara berkala untuk mematuhi peraturan pusat yang terus berubah. Di sisi non-teknis, adaptasi karyawan terhadap sistem digital masih menantang karena memerlukan perubahan pada kebiasaan kerja yang sudah ada. Agar proses transisi ini berhasil, pelatihan dan pendampingan yang berkelanjutan diperlukan.

5. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, implementasi digitalisasi pengelolaan keuangan daerah di Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melalui sistem e-Budgeting dan SIPD mampu meningkatkan transparansi dan akuntabilitas publik dalam pengelolaan APBD. Digitalisasi mempermudah proses perencanaan, penganggaran, pelaporan, dan pengawasan keuangan secara lebih efektif, efisien, serta real time. Selain itu, keterbukaan informasi keuangan kepada masyarakat turut memperkuat pengawasan publik dan mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik (good governance). Namun, dalam pelaksanaannya masih terdapat beberapa kendala seperti keterbatasan sumber daya manusia, gangguan teknis sistem, dan tantangan keamanan data sehingga diperlukan peningkatan kompetensi aparatur serta penguatan infrastruktur teknologi secara berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Akbar, F., Sinaga, N. yabest, & Rizal, M. (2024). Jurnal Ilmu Ekonomi dan Bisnis Islam. *Analisis Stabilitas Persediaan Pada Anggaran Produksi PT Unilever Tbk. Tahun 2024*, 2(1), 19-27.
- [2] Aliyah Rifdatul Nabilah, Nurhayati, Risma Dwiyana Arianty, Arshafa Rayya Maulidya, Afida Ayu Azalia, Cahyo Bagus Alvian, Revienda Anita Fitrie, & Melda Fadiyah Hidayat. (2026). Akuntabilitas Dana Transfer Pusat Ke Daerah: Studi UU No. 1 Tahun 2022. *Al-Zayn : Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, 4(3 SE-Articles), 5375-5390. <https://doi.org/10.61104/alz.v4i3.6171>
- [3] Arfitsani, A. N., & Prathama, A. (2025). Inovasi Perencanaan Anggaran Belanja Kegiatan Melalui Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sidoarjo. *Public Service and Governance Journal*, 6(1), 46-57. <https://doi.org/10.56444/psgj.v6i1.2385>
- [4] Ciancarini, P., Giancarlo, R., & Grimaudo, G. (2024). Digital transformation in the public administrations: A guided tour for computer scientists. *IEEE Access*, 12, 22841-22865.
- [5] Dotulung, M. T. P. (2025). Kajian Yuridis Transparansi Dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah Berbasis Elektronik. *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 5(4 SE-Articles), 4630-4645. <https://doi.org/10.31004/innovative.v5i4.20729>
- [6] Hasanah, S., & Siregar, T. R. (2021). Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah, Sistem Informasi Akuntansi, Sistem Pengendalian Intern, dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Terhadap Kualitas Laporan Keuangan OPD di Kabupaten Labuhanbatu. *JAKPI - Jurnal Akuntansi, Keuangan & Perpajakan Indonesia*, 9(1), 39. <https://doi.org/10.24114/jakpi.v9i1.25706>
- [7] Ilham Ferdiansyah, Itat Tatmimah, & Muzayyanah, M. (2025). Pengaruh Akuntabilitas Dan Transparansi Pelaporan Terhadap Digitalisasi Pengelolaan Keuangan. *Jurnal Ekonomi Bisnis, Manajemen Dan Akuntansi*, 4(2 SE-Articles), 449-460. <https://doi.org/10.61930/jebmak.v4i2.1140>
- [8] Iswandari, B. A. (2021). Jaminan Atas Pemenuhan Hak Keamanan Data Pribadi Dalam Penyelenggaraan E-Government Guna Mewujudkan Good Governance. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 28(1), 115-138. <https://doi.org/10.20885/iustum.vol28.iss1.art6>
- [9] Jaelani, A. M., Syahbani, M. F. N., Furata, A., & Mais, R. G. (2026). ANALYSIS OF THE IMPLEMENTATION OF GOOD GOVERNANCE PRINCIPLES IN THE MANAGEMENT OF SUSTAINABLE DIGITAL PUBLIC SERVICES THROUGH THE JAKI APPLICATION IN DKI JAKARTA. *Interdisciplinary Journal of Global and Multidisciplinary*, 2(1), 316-327.
- [10] Mandasari, Y. E., Darajat, T. A., & Nurhasanah, N. (2024). Pengaruh Pengelolaan Keuangan Daerah, Akuntabilitas dan Transparansi terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2022. *Costing: Journal of Economic, Bussines and Accounting*, 7.
- [11] Manggaprouw, Y. R., Anggraini, R., & Yusuf, M. (2025). Pengaruh Transparansi, Kompetensi, dan SPI Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan pada BPKAD Papua. *Jurnal Akuntansi, Perpajakan Dan Auditing*, 6(3), 458-474.
- [12] Mozin, S. Y., & Isa, R. (2023). Optimalisasi pelayanan publik dalam tata kelola pemerintahan desa. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Bangsa*, 1(4), 150-155.
- [13] Novianty, I., & Kurniawati, D. (2025). DETERMINANTS OF THE QUALITY OF REGIONAL GOVERNMENT FINANCIAL REPORTS. *JIAR: Journal Of International Accounting Research*, 4(01), 1-17.
- [14] Rismanda, A. D. (2022). *Efektivitas Pelaksanaan Electronic Budgeting dalam Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi DKI Jakarta*. Institut Pemerintahan Dalam Negeri.
- [15] Sinulingga, E. N. (2025). Inovasi Manajemen Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD) Management Innovation in Local Government. *Jurnal Inovasi Kebijakan*, 9, 17-28.

file:///C:/Users/USER/Downloads/02%232549.pdf

[16] Sugiyono. (2023). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (Sutopo, Ed.). ALFABETA.

[17] Tewu, M. L. D., Elisabet, S. B., & Gustiana, N. (2024). Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan: Manajemen Risiko dan Sistem Pengendalian Intern di Kecamatan Kabupaten Bekasi. *JURNAL Comunit  Servizio: Jurnal Terkait Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat, Terkhusus Bidang Teknologi, Kewirausahaan Dan Sosial Kemasyarakatan*, 6(1), 112-133.

[18] Wuryan Andayani, Dahlia, Eka Putrianti, Oktavima Wisdaningrum, Panji Putranto, & Yesika Yanuarisa. (2024). Penguatan Good Governance: Pengalaman Penerapan Electronic Government Pemerintah Daerah Di Indonesia. *Jurnal Aktiva : Riset Akuntansi Dan Keuangan*, 6(2), 116-131. <https://doi.org/10.52005/aktiva.v6i2.240>